

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA BATU PERIODE 2016-2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



OLEH:

PETRUS CIK

NIM: 2020110111

**KONSENTRASI PERPAJAKAN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2024**

RINGKASAN

Pajak daerah mempunyai peranan yang besar dalam mendanai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batu sedang melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak daerah periode 2016–2022. jenis studi deskriptif kuantitatif tertentu. Sumber data sekunder yang digunakan adalah tujuan dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Batu tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Dalam analisisnya, deskripsi adalah metode yang digunakan. Meski bervariasi, penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kota Batu seringkali lebih efektif pada tahun 2016 hingga 2022. Hal ini menunjukkan besarnya potensi pemungutan pajak daerah Kota Batu dalam meningkatkan PAD, mendorong pembangunan daerah, dan mendukung pelayanan publik. Namun mempertahankan dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah juga memerlukan pemantauan dan penilaian yang lebih ketat dan teratur, serta perencanaan dan penetapan tujuan yang lebih ideal dan praktis di tingkat daerah. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (BAPENDA) harus melakukan perencanaan, bekerja sama dengan lebih banyak pihak terkait dalam kolaborasi dan koordinasi, meningkatkan pemantauan dan penilaian, serta mendukung sosialisasi dan edukasi masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kemajuan berkelanjutan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara. Menurut Risnaningsih dkk. (2021) dan Suhendri dkk. (2021), penerimaan pajak merupakan salah satu unsur penyumbang pembangunan nasional. Suatu bangsa, wilayah, atau komunitas dapat menggunakan pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan, kemajuan, dan kesejahteraannya. Pembangunan dapat mencakup berbagai elemen, termasuk masalah sosial, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Perpajakan merupakan suatu alat pengaturan yang digunakan negara untuk menghimpun atau memperoleh pembayaran sukarela dari wajib pajak yang berhutang. Dalam sistem ini, pajak menghasilkan pendapatan bagi negara, yang kemudian bertanggung jawab mengelola dana tersebut untuk mendanai pengeluarannya (Risnaningsih, Suhendri, Lutfiyanto, 2022). Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, pajak daerah mempunyai peranan yang cukup besar dalam menghasilkan pendapatan bagi pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, dan pencapaian otonomi daerah. Di antara sumber-sumber utama gaji daerah yang menjadi sumber utama subsidi daerah adalah gaji unik provinsi (bantalan), cadangan penyesuaian, kredit daerah, dan bentuk-bentuk pendapatan sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Retribusi daerah berfungsi sebagai alat penting untuk mendorong berbagai inisiatif kemajuan provinsi dan meningkatkan perekonomian wilayah dengan cara ini.

Menurut Julie dan Retno (2015:8), tiga komponen struktur pilihan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. *Official Assessment system*

Pemerintah (fiscus) mempunyai kekuasaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban perpajakan orang pribadi berkat cara pemungutan tersebut.

2. *Self Assessment System*

memberikan masyarakat umum kemampuan untuk menentukan tanggung jawab perpajakan mereka sendiri sebagai cara memungut pajak.

3. *With Holding system*

Suatu proses pemberian tugas dimana jumlah pengeluaran yang harus dibayar oleh warga negara ditentukan oleh pihak luar dan bukan oleh otoritas pengeluaran atau pihak lain yang terlibat langsung.

Tugas pengawasan dan pengaturan keluarga dalam rangka peningkatan upah teritorial berada pada legislator setempat. Pemerintahan daerah provinsi diberi tugas menggunakan keahliannya untuk menetapkan strategi yang dapat meningkatkan dukungan pemerintah daerah dan kelancaran administrasi sesuai dengan ciri-ciri yang diuraikan dalam Peraturan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara khusus, pajak daerah harus dipungut secara konsisten untuk mendanai berbagai inisiatif pembangunan dan layanan publik yang penting bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat lokal.

Keputusan telah diambil untuk membagi dua satuan kerja, BKAD dan BAPENDA, menjadi organisasi independen berdasarkan sinopsis Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKD). Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, restrukturisasi organisasi ditunjukkan pada kasus Kota Batu yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu yang dibentuk melalui penggabungan BKAD dan BAPENDA.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengeluaran Wilayah Kota Batu, pemerintah provinsi seharusnya menyusun sebelas kategori tugas yang tidak biasa. Selain biaya untuk aset dan bantuan non-logam, pungutan ini mencakup jasa penginapan, makan, dan hiburan. Hal ini menunjukkan dedikasi pemerintah daerah dalam menggalang dana yang diperlukan untuk menopang berbagai inisiatif pembangunan dan pelayanan publik bagi

masyarakat Kota Batu. Selain itu, pajak atas periklanan, air tanah, dan penerangan jalan termasuk dalam bea yang berkaitan dengan pajak. Penting untuk diingat bahwa ada pajak tambahan untuk konstruksi dan penggunaan lahan, pajak sarang burung walet, dan biaya yang terkait dengan perolehan tanah. Dengan demikian, sistem perpajakan yang diatur secara formal dalam peraturan daerah juga menyasar berbagai sektor ekonomi dan sumber daya alam untuk pendapatan daerah Kota Batu.

Data yang dikumpulkan menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mencapai tujuan pendapatan fiskal mereka. Pemerintah daerah diperkirakan akan dapat berfungsi lebih menguntungkan jika mereka mampu meningkatkan pendapatan melebihi anggaran mereka. Sebaliknya, hal ini dipandang negatif jika pendapatan aktual lebih rendah dari yang diperkirakan.

Anggaran berfungsi sebagai titik batas pencapaian tujuan, artinya efektivitas BAPENDA kota dinilai berdasarkan tingkat pencapaian tujuan semaksimal mungkin. Perolehan pendapatan pajak daerah sangat bergantung pada seberapa baik kinerja BAPENDA Kota Batu. Jumlah riil yang diterima setelah mencapai tujuan pendapatan PAD dan target pendapatan tidak jauh berbeda. Sektor 2004

Mengingat konteks permasalahan dan pokok bahasan penelitian yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik pada gagasan penilaian pendapatan dengan menggunakan laporan pelaksanaan anggaran untuk menunjukkan kinerja keuangan Kantor BAPENDA Kota Batu.

“Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batu Periode 2016-2022”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang informasi tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan diajukan adalah: Seberapa efektifkah penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kota Batu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan menggunakan kesulitan-kesulitan yang diidentifikasi dan dibahas sebagai dasar, penelitian ini mencoba menilai efisiensi pemungutan pajak daerah di kantor BAPENDA Kota Batu pada tahun 2016 hingga 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Bagi Peneliti

Ketika memasuki dunia kerja, diharapkan pembelajaran ini akan memberikan kesempatan yang baik untuk menerapkan konsep-konsep yang dipelajari. Laporan Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (BAPENDA) juga diharapkan dapat dibuat dengan memanfaatkan data penelitian.

1.4.2 Bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi

Terkait dengan Penelusuran Kelayakan Pendapatan Bea dan Cukai Provinsi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (BAPENDA), temuan dari peninjauan ini diyakini dapat bermanfaat dan menjadi sumber data bagi pihak-pihak terkait serta kajian lebih lanjut.

1.4.3 Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi penyelidikan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kota Batu (BAPENDA) terhadap kelayakan pendapatan belanja daerah.

1. DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Rizka, Khozin Arief, And Jouzar Farouq Ishak. 2021. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung Khozin Arief Jouzar Farouq Ishak." *Indonesian Accounting Research Journal* 2(1):52–62.
- Br Siagian, D. I. (2021). Analisis Laporan Kinerja Anggaran Pendapatan Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Asahan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).Aten Oku." *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 5.2 (2020): 135-144.
- Daerah, Undang-Undang No 32 Tahun 2. Tentang Pemerintah. 2004. "Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah." *Dpr* 249.
- Darmasto, Bonifatius, Kamaliah, And Restu Agusti. 2020. "Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Metode Balanced Scorecard." *Jurnal Sorot* 8(1):95–104.
- Erwati, Misni, And Muhammad Rizki Fajri(2017)."Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 6.2 (2017): 120-127.
- Fajri, Muhammad Rizki. 2017. "Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo Misni." 120–27.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Matondang, Abdul Waha, And Mawaddah Mutia Rohmah. 2018. "Analisis Pendapatan Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Binjai." *Jurnal Manajemen* 4(2):103–12.
- Meiliya Dona, E., & Lestari, V. A. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 135-144.
- Nova, G. D. A., And R. Priyandini. 2020. "Analisis Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013-2017." *Ekonomika* Vol.13(2):117–31.
- Palembang, Walikota. 2022. "Perubahan Atas Peraturan W Alikota Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah."
- Rahman, Fuad,Aulia. 2015. "Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Atas Royalti Penulis Dan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Buku Ditinjau Dari Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak Oleh:" *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* 3(April):49–58.
- Rayhan, Tengku. 2020. "Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara."
- Risnaningsih, Soko Wikardojo, Ahmad Mukoffi, Adelsiana Lero Kaka. 2021. "Analisis Fasilitas Tarif Pajak Penghasilan Terutang Ditinjau dari Penghasilan Bruto". *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16 (3) : 417-424.
- Risnaningsih, Hendrik Suhendri, Lutfiyanto. 2023. "Analisis Kebermanfaatan Dan Kemudahan Wajib Pajak Pada Dosen tetap Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang dalam

- Penggunaan e-filling Sebagai Sistem Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik". *JEMAP Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan*, 5 (2) : 274-298.
- Suharyadi. 2019. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap The Effects Of Local Tax And Local Retribution On." *Jurnal E-Proceeding Of Management* 2(1):281–88.
- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68.
- Tahun, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8. 2019. "Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Dengan." *Duke Law Journal* 1(1).
- Suhardi, Deddy, And Mella Amelia Ay.(2023) "Analisis Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang Periode 2019-2021." *The World Of Financial Administration Journal* (2023).
- Tinangon, Jantje J. 2019. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7(2):1051–60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 2009. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan." *Kementerian Sekretariat Negara* 1–11.
- Zickuhr, By Kathryn Michael. 2016. "Analisis Perbandingan Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Final Dan Tidak Final Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Jasa Instalasi Perusahaan Konstruksi (Studi Kasus Pt. X) Oleh." (June).